

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEWENANGAN UNITED
NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR)
DALAM MENETAPKAN STATUS PENGUNGI TERHADAP
IMIGRAN ILEGAL DAN PELAKSANAANNYA
DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar
sarjana hukum fakultas hukum universitas andalas*



Oleh :

TRIONESA PUTRA AJENG

1310112175

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM INTERNASIONAL (PK VII)

Pembimbing :

**Dr. Mardenis, S.H., M.Si
Dewi Enggriyeni, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2018

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEWENANGAN UNITED NATIONS HIGH
COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) DALAM MENETAPKAN
STATUS PENGUNGSI TERHADAP IMIGRAN ILEGAL DAN
PELAKSANAANNYA DI INDONESIA**

ABSTRAK

UNHCR merupakan salah satu agen dalam tubuh keorganisasian PBB yang muncul sebagai penerus dari *United Nations Relief and Rehabilitation Administration* (UNRRA). UNHCR melakukan penentuan status pengungsi dan pemberian solusi. Kewenangan UNHCR dalam penetapan status pengungsi terhadap imigran ilegal dapat dijadikan bahan untuk dianalisa. Perumusan permasalahan dalam Skripsi ini adalah: *Pertama*, bagaimanakah pengaturan tentang kewenangan UNHCR menurut hukum Internasional dalam menetapkan status pengungsi terhadap Imigran ilegal? *Kedua*, bagaimanakah pelaksanaan kewenangan UNHCR tersebut di Indonesia? Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis normatif yang bersifat *deskriptif analitis*. Data yang didapat dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan analisa dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengaturan kewenangan UNHCR menurut hukum Internasional dalam menetapkan status pengungsi terhadap Imigran ilegal yaitu dimulai ketika pihak imigrasi melaporkan bahwa ada imigran ilegal yang masuk ke dalam wilayah Indonesia dan bila imigran tersebut merupakan pencari suaka yang ingin mengajukan permohonan menjadi pengungsi maka UNHCR akan melakukan proses menetapkan status pengungsi terhadap Imigran ilegal terhadap mereka. Pelaksanaan kewenangan UNHCR di Indonesia dalam menetapkan status pengungsi Imigran ilegal, dimulai sejak tahap pendaftaran atau registrasi kemudian dilanjutkan dengan interview, setelah interview maka barulah UNHCR menetapkan status pengungsi terhadap pencari suaka.

